

### **Tahap 1 menentukan outcome**

Cara menentukan outcome

- a Mandat/Tugas dan Fungsi
- b Permasalahan yang dihadapi
- c Ekspektasi atau harapan masyarakat dan stake holder

Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap cara melaporkan LKPM  
Kemudahan dalam perizinan usaha dan adanya kepastian hukum terkait penanaman modal

### **Trik menentukan outcome**

- 1 Outcome harus dirumuskan dengan kesepakatan bersama
- 2 Outcome instansi harus menggambarkan hasil yang strategis
- 3 Outcome tidak harus ketiga faktor pembentuk diatas , namun umumnya bisa saling terkait
- 4 Jika outcome strategis bukan final outcome atau intermediate outcome maka instansi harus melihat kembali kebenaran dari kinerja outcome tersebut



Tahap 1 Menentukan outcome Dinas PMPTSPPTK

**Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan**

## Tahap 2

## Identifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

### Trik menentukan CSF

- 1 CSF menggambarkan isu faktual
- 2 CSF menggambarkan kebutuhan mencapai kinerja dimasa mendatang
- 3 CSF mempertimbang perubahan lingkungan
- 4 Pastikan CSF adalah sebab atau cara dan outcome adalah akibat atau hasil

	<b>CSF Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan</b>	<b>Kondisi yang diperlukan</b>
1	Kurang Optimalnya Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatkan Investasi Daerah
2	Kurang Optimalnya pelayanan perijinan dan non perizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan perijinan dan Non Perizinan
3	Peningkatan kondisi keamanan	Meningkatnya keamanan daerah
4	Peningkatan 'PDRB	Meningkatnya PDRB

### Tahap 3

Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional

- 1 trik menguraikan kondisi antara sampai ke kondisi operasional (sebagai bahan menyusun pohon kinerja)
- 2 jangan kaitkan dulu dengan komponen perencanaan
- 3 jangan kaitkan dulu dengan sotk eksisting
- 4 jangan kaitkan dulu dengan nama program atau kegiatan
- 5 jangan kaitkan dulu dengan anggaran
- 6 identifikasi adanya crosscutting dengan organisasi lain
- 7 jangan redundansi atau kondisi dituangkan berulang kali
- 8 cek lagi siapa tahu alpa menentukan kondisi anantara yang urgen
- 9 eliminasi variabel yang tidak memiliki pengaruh besar

CSF yang sudah dirubah ke bahasa kondisi pada tahap 2	Kondisi yang diperlukan (kondisi antara sampai kondisi paling operasional)	Keterangan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	kondisi antara utama
	Meningkatnya LKPM pelaku usaha	kondisi antara
	Terlaksananya pembinaan terhadap Pelaku Usaha	kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	kondisi operasional
	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	kondisi operasional
	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	kondisi antara utama
	Tersedianya regulasi/ produk hukum daerah terkait investasi/ Penanaman modal	kondisi antara
	Tersusunnya produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal	kondisi operasional
	Terlaksananya monev produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal	kondisi operasional
	Tersedianya peta potensi investasi	kondisi antara
	Tersusunnya produk hukum daerah terkait kawasan potensi investasi	kondisi operasional
	Pemetaan kawasan potensi investasi	kondisi operasional
	Meningkatnya promosi penanaman modal	kondisi antara utama
	Terselenggaranya promosi penanaman modal	kondisi antara
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	kondisi operasional
	Tersusunnya setrategi promosi penanaman modal	kondisi operasional

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan perijinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	kondisi antara utama
	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memadai	kondisi antara
	Tersedianya pelayanan perizinan secara elektronik	kondisi operasional
	Terlaksananya Monev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	kondisi operasional
	Terlaksananya Penetapan Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kondisi operasional
	Terselesaikannya pengaduan masyarakat	kondisi antara
	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	kondisi operasional
	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	kondisi antara utama
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	kondisi antara
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	kondisi operasional

Peningkatan kondisi keamanan	Croscutting SATPOL PP dan KESBANGPOL
Peningkatan 'PDRB	Croscutting DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN, dan DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

#### Tahap 4 Merumuskan Indikator Kinerja

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan
Tahap 1	Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	Persentase peningkatan investasi daerah	kinerja strategis skpd
Tahap 2	Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi investasi	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Meningkatnya LKPM pelaku usaha	(Laporan Realisasi Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya pembinaan terhadap Pelaku Usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	(Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan)	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	(Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Tersedianya regulasi/ produk hukum daerah terkait investasi/ Penanaman modal	(PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal; Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal )	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersusunnya produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal	(Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal)	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya monev produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah)	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya peta potensi investasi	(Jumlah Potensi Investasi Kabupaten/Kota)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersusunnya produk hukum daerah terkait kawasan potensi investasi	(Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota)	kinerja operasional
Tahap 3	Pemetaan kawasan potensi investasi	(Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota)	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya promosi penanaman modal	( Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terselenggaranya promosi penanaman modal	(Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on one meeting; Kegiatan Pameran Penanaman Modal )	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	(Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota)	kinerja operasional
Tahap 3	Tersusunnya setrategi promosi penanaman modal	(Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota)	kinerja operasional
Tahap 2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP/PTK	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	(Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP)	kinerja taktikal intermediate

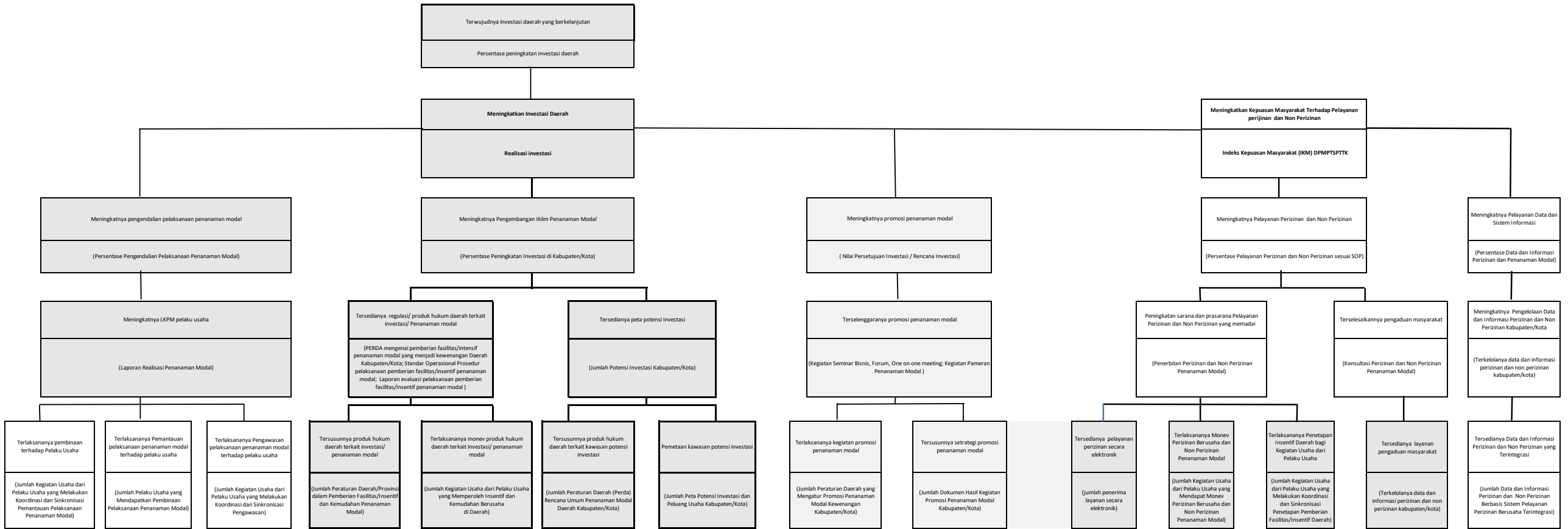
Tahap 3	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memadai	(Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersedianya pelayanan perizinan secara elektronik	(Jumlah penerima layanan secara elektronik)	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Monev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Monev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal)	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Penetapan Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah)	kinerja operasional
Tahap 3	Terselesaikannya pengaduan masyarakat	(Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	'(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani)	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	(Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	(Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	(Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi)	kinerja operasional
Tahap 2	Peningkatan kondisi keamanan	Crosscutting	Crosscutting
Tahap 2	Peningkatan 'PDRB	Crosscutting	Crosscutting

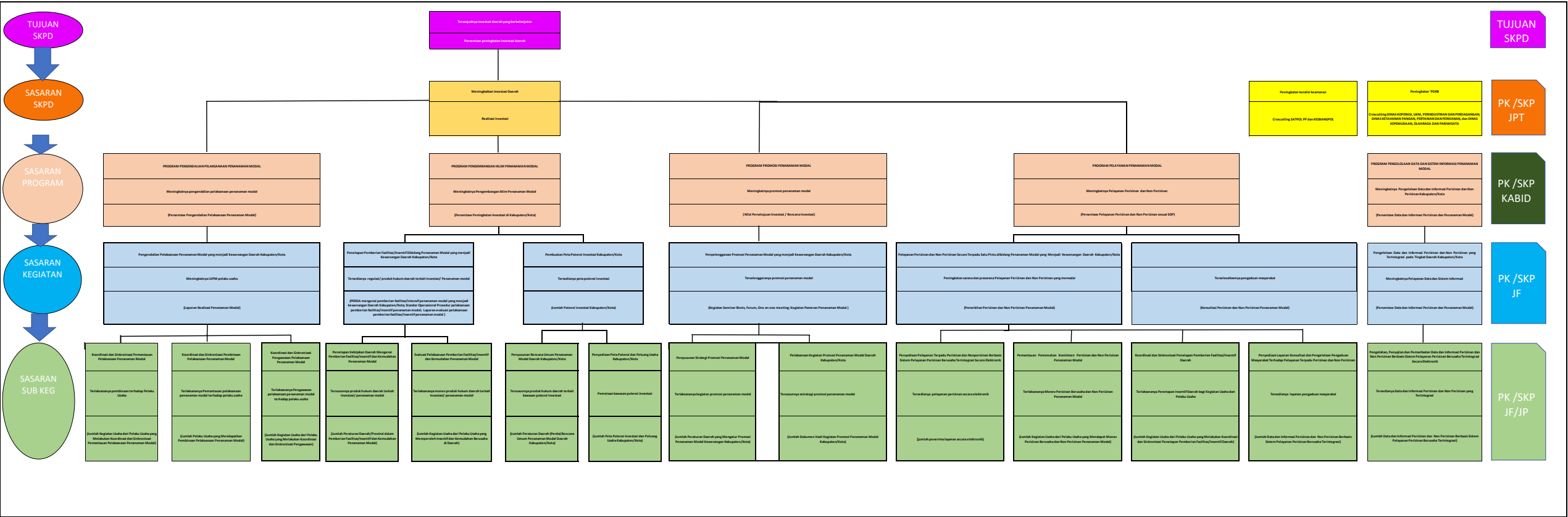
Tahap 5 menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan		
Tahap 1	Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	Persentase peningkatan investasi daerah	kinerja strategis skpd	Tujuan SKPD	
Tahap 2	Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi investasi	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK Jabatan Pimpinan Tinggi
Tahap 3	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Meningkatnya LKPM pelaku usaha	(Laporan Realisasi Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya pembinaan terhadap Pelaku Usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	(Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	(Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Tersedianya regulasi/ produk hukum daerah terkait investasi/ Penanaman modal	(PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersusunnya produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal	(Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya movev produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya peta potensi investasi	(Jumlah Potensi Investasi Kabupaten/Kota)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersusunnya produk hukum daerah terkait kawasan potensi investasi	(Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Pemetaan kawasan potensi investasi	(Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Meningkatnya promosi penanaman modal	( Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terselenggaranya promosi penanaman modal	(Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on one meeting; Kegiatan Pameran Penanaman Modal )	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	(Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersusunnya setrategi promosi penanaman modal	(Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTPTTK	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK Jabatan Pimpinan Tinggi
Tahap 3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	(Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memadai	(Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya pelayanan perizinan secara elektronik	(jumlah penerima layanan secara elektronik)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya Movev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Movev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF

Tahap 3	Terlaksananya Penetapan Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	(Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terselesaikannya pengaduan masyarakat	(Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	'(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	(Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	(Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	(Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 2	Peningkatan kondisi keamanan	Crosscutting	CROSSCUTTING		
Tahap 2	Peningkatan 'PDRB	Crosscutting	CROSSCUTTING		







TUJUAN SKPD

SASARAN SKPD

SASARAN PROGRAM

SASARAN KEGIATAN

SASARAN SUB KEG

<p>Tujuan investasi dan pengembangan daerah</p> <p>Perencanaan/pengembangan investasi daerah</p>		<p>Meningkatkan Investasi Daerah</p> <p>Realisasi investasi</p>		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL</p> <p>Meningkatkan pengembangan ilmu penanaman modal</p> <p>(Persentase Pengembangan Investasi di Kabupaten/Kota)</p>		<p>PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL</p> <p>Meningkatkan pengembangan ilmu penanaman modal</p> <p>(Persentase Pengembangan Investasi di Kabupaten/Kota)</p>		<p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>Meningkatkan promosi penanaman modal</p> <p>(Nilai Perolehan Investasi / Rencana Investasi)</p>		<p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>(Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SDP)</p>		<p>Peningkatan kinerja keamanan</p> <p>Penyusunan SATPOL PP dan KEBANGKOPRI</p>	<p>Peningkatan POBI</p> <p>Penyusunan DINAS KOPRI, LINA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KETERAMPILAN PASIANG, PETAJARAN KETERAMPILAN, dan DINAS KEPERAWATAN, DAURAGRA DAN FARMASIA</p>
<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatkan KPM pelaku usaha</p> <p>Laporan Realisasi Penanaman Modal</p>		<p>Pasangan Pembelian Fasilitas/Insentif/Obat-obat Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapatnya kegiatan/produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal</p> <p>SPRODA mengadopsi perubahan dan fasilitasi/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, melalui Operasional Prosedur pelaksanaan perubahan dan fasilitasi/insentif penanaman modal. Laporan realisasi pelaksanaan perubahan dan fasilitasi/insentif penanaman modal</p>		<p>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapatnya peta potensi investasi</p> <p>Jumlah Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p>		<p>Penyusunan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapatnya promosi penanaman modal</p> <p>(Kegiatan Seminar Binar, Forum, One on one meeting, Kegiatan Pemoran Penanaman Modal)</p>		<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu/otakbeling Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memadai</p> <p>(Penyerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)</p>		<p>Terdapatnya pelayanan yang memadai</p> <p>(Sistem Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)</p>		<p>PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p> <p>Meningkatnya Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota</p> <p>(Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal)</p>	<p>Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi</p> <p>(Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal)</p>
<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya peninjauan terhadap Pelaku Usaha</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya Peninjauan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan/ Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya Pengembangan/ pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan/ Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Persiapan Kebijakan Daerah Mengenai Pembelian Fasilitas/Insentif dan Kebutuhan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal</p> <p>Jumlah Peraturan Daerah/Prosedur dalam Pembelian Fasilitas/Insentif dan Kebutuhan Penanaman Modal</p>	<p>Ukuran Pelaksanaan Pembelian Fasilitas/Insentif dan Kebutuhan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya rencana produk hukum daerah terkait investasi/ penanaman modal</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Fasilitas/Insentif dan Kebutuhan Penanaman Modal</p>	<p>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapatnya produk hukum daerah terkait rencana potensial investasi</p> <p>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengertian Peta Potensi dan Peta Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Persamaan kawasan potensial investasi</p> <p>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peta Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya kegiatan promosi penanaman modal</p> <p>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terdapatnya strategi promosi penanaman modal</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>Terdapatnya pelayanan perizinan secara elektronik</p> <p>Jumlah pemenuhan layanan secara elektronik</p>	<p>Pemenuhan Perizinan, Kamtibmas, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>Terdapatnya Monev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Monev Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pembelian Fasilitas/Insentif Daerah</p> <p>Terdapatnya Penetapan Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Insentif dan Sinkronisasi Penetapan Pembelian Fasilitas/Insentif Daerah</p>	<p>Penyediaan Layanan Komufid dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Terdapatnya layanan pengaduan masyarakat</p> <p>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi</p>	<p>Pengolahan, Penyajian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>Terdapatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</p> <p>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi</p>

TUJUAN SKPD

PK /SKP JPT

PK /SKP KABID

PK /SKP JF

PK /SKP JF/JP

## Tahap 1 menentukan outcome

Cara menentukan outcome

- a Mandat/Tugas dan Fungsi
- b Permasalahan yang dihadapi
- c Ekspektasi atau harapan masyarakat dan stake holder

Masyarakat mengekspektasi penurunan angka pengangguran

## Trik menentukan outcome

- 1 Outcome harus dirumuskan dengan kesepakatan bersama
- 2 Outcome instansi harus menggambarkan hasil yang strategis
- 3 Outcome tidak harus ketiga faktor pembentuk diatas , namun umumnya bisa saling terkait
- 4 Jika outcome strategis bukan final outcome atau intermediate outcome maka instansi harus melihat kembali kebenaran dari kinerja outcome tersebut



Tahap 1 Menentukan outcome Dinas **Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka**  
PMPTSPTTK

Tahap 2

Identifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

Trik menentukan CSF

- 1 CSF menggambarkan isu faktual
- 2 CSF menggambarkan kebutuhan mencapai kinerja dimasa mendatang
- 3 CSF mempertimbang perubahan lingkungan
- 4 Pastikan CSF adalah sebab atau cara dan outcome adalah akibat atau hasil

	<b>CSF MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA</b>	<b>Kondisi yang diperlukan</b>
1	Kurangnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan
3	Kurangnya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja	Meningkatnya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja
3	Belum optimalnya hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan	Menciptakan hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan
4	Pendidikan angkatan kerja masih rendah	Meningkatnya Pendidikan Angkatan Kerja
5	Rendahnya tingkat kesehatan tenaga kerja	Meningkatnya Kesehatan Tenaga Kerja

Tahap 3

Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional

- 1 trik menguraikan kondisi antara sampai ke kondisi operasional (sebagai bahan menyusun pohon kinerja)
- 2 jangan kaitkan dulu dengan komponen perencanaan
- 3 jangan kaitkan dulu dengan sotk eksisting
- 4 jangan kaitkan dulu dengan nama program atau kegiatan
- 5 jangan kaitkan dulu dengan anggaran
- 6 identifikasi adanya crosscutting dengan organisasi lain
- 7 jangan redundansi atau kondisi dituangkan berulang kali
- 8 cek lagi siapa tahu alpa menentukan kondisi anantara yang urgen
- 9 eliminasi variabel yang tidak memiliki pengaruh besar

CSF yang sudah dirubah ke bahasa kondisi pada tahap 2	Kondisi yang diperlukan (kondisi antara sampai kondisi paling operasional)	Keterangan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya pelatihan keterampilan tenaga kerja	kondisi antara utama
	Terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	kondisi antara
	Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional	kondisi operasional
	Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar	kondisi operasional
Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tersedianya kerjasama sertifikasi keahlian	kondisi operasional
	Meningkatnya layanan informasi peluang kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak swasta	kondisi antara utama
	Terselenggaranya layanan informasi peluang kerja	kondisi antara
	Tersedianya layanan media informasi peluang kerja	kondisi operasional
	Tersedianya bursa pasar kerja	kondisi operasional
	Terselenggaranya pelayanan antar kerja dengan pihak swasta baik di dalam/luar daerah dan luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja	kondisi antara
	Terlaksananya bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya	kondisi operasional
	Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	kondisi operasional
	Terciptanya peluang kerja mandiri	kondisi antara
	Tersedianya bantuan modal dan peralatan kerja	kondisi operasional
Meningkatnya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan	terciptanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja	Kondisi Antara Utama
	Terevaluasinya Dokumen rencana tenaga kerja Kabupaten	Kondisi Antara
	Tersedianya dokumen dan evaluasi rencana tenaga kerja Kabupaten	Kondisi Operasional

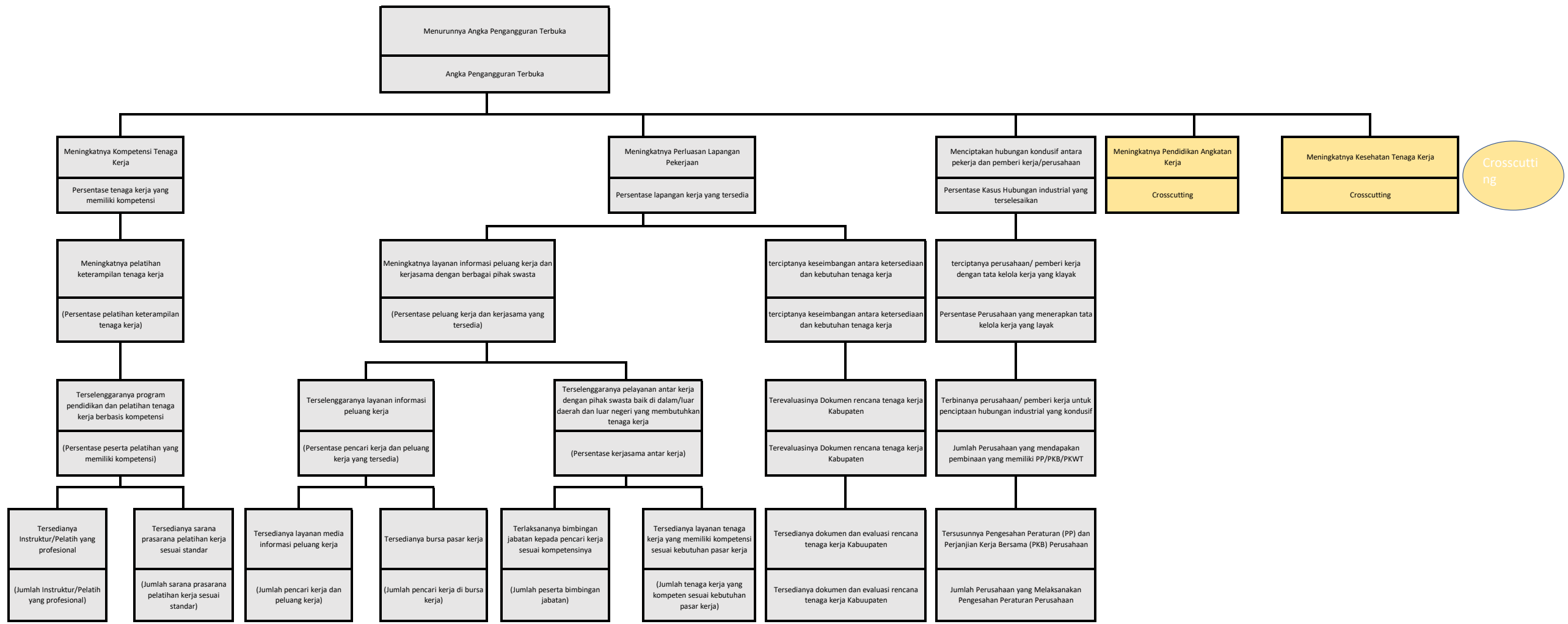
Menciptakan hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan	terciptanya perusahaan/ pemberi kerja dengan tata kelola kerja yang klayak	Kondisi Antara Utama
	Terbinanya perusahaan/ pemberi kerja untuk penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Kondisi Antara
	Tersusunnya Pengesahan Peraturan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan	Kondisi Operasional
Meningkatnya Pendidikan Angkatan Kerja	CROSCUTTING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Meningkatnya Kesehatan Tenaga Kerja	CROSCUTTING KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

#### Tahap 4 Merumuskan Indikator Kinerja

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan
Tahap 1	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	kinerja strategis skpd
Tahap 2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya pelatihan keterampilan tenaga kerja	(Persentase pelatihan keterampilan tenaga kerja)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	(Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi)	Kinerja taktikal
Tahap 3	Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional	(Jumlah Instruktur/Pelatih yang profesional)	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar	(Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar)	kinerja operasional
tahap 2	Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan	Persentase lapangan kerja yang tersedia	kinerja strategis skpd
Tahap 3	Meningkatnya layanan informasi peluang kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak swasta	(Persentase peluang kerja dan kerjasama yang tersedia)	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terselenggaranya layanan informasi peluang kerja	(Persentase pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia)	Kinerja taktikal
Tahap 3	Tersedianya layanan media informasi peluang kerja	(Jumlah pencari kerja dan peluang kerja)	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya bursa pasar kerja	(Jumlah pencari kerja di bursa kerja)	kinerja operasional
Tahap 3	Terselenggaranya pelayanan antar kerja dengan pihak swasta baik di dalam/luar daerah dan luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja	(Persentase kerjasama antar kerja)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya	(Jumlah peserta bimbingan jabatan)	kinerja operasional
Tahap 3	Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	(Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja)	kinerja operasional
Tahap 3	terciptanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terevaluasinya Dokumen rencana tenaga kerja Kabupaten	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Tersedianya dokumen dan evaluasi rencana tenaga kerja Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kinerja Operasional
Tahap 2	Menciptakan hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan	Persentase Kasus Hubungan industrial yang terselesaikan	kinerja strategis skpd
Tahap 3	terciptanya perusahaan/ pemberi kerja dengan tata kelola kerja yang layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terbinanya perusahaan/ pemberi kerja untuk penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan yang memiliki PP/PKB/PKWT	Kinerja taktikal immediate

Tahap 3	Tersusunnya Pengesahan Peraturan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kinerja Operasional
Tahap 2	Meningkatnya Pendidikan Angkatan Kerja	Crosscutting	Crosscutting
Tahap 2	Meningkatnya Kesehatan Tenaga Kerja	Crosscutting	Crosscutting

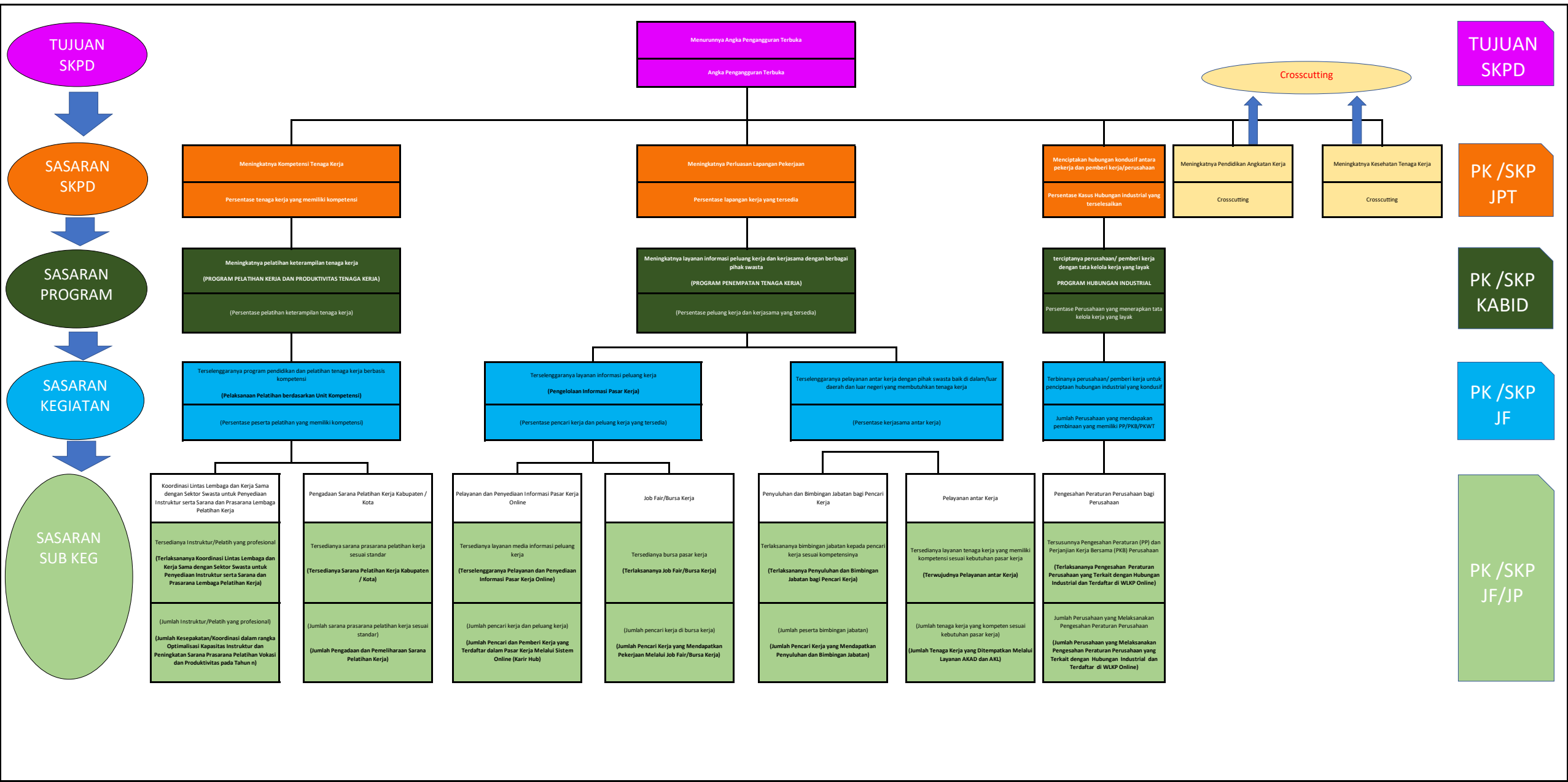




Tahap 5 menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan		
Tahap 1	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	kinerja strategis skpd	Tujuan SKPD	
Tahap 2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK Jabatan Pimpinan Tinggi
Tahap 3	Meningkatnya pelatihan keterampilan tenaga kerja	(Persentase pelatihan keterampilan tenaga kerja)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	(Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional	(Jumlah Instruktur/Pelatih yang profesional)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar	(Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
tahap 2	Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan	Persentase lapangan kerja yang tersedia	kinerja stratgis skpd	Sasaran kedua SKPD	PK JPT
Tahap 3	Meningkatnya layanan informasi peluang kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak swasta	(Persentase peluang kerja dan kerjasama yang tersedia)	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terselenggaranya layanan informasi peluang kerja	(Persentase pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia)	Kinerja taktikal	sasaran Kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersedianya layanan media informasi peluang kerja	(Jumlah pencari kerja dan peluang kerja)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
Tahap 3	Tersedianya bursa pasar kerja	(Jumlah pencari kerja di bursa kerja)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terselenggaranya pelayanan antar kerja dengan pihak swasta baik di dalam/luar daerah dan luar negeri	(Persentase kerjasama antar kerja)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Terlaksananya bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya	(Jumlah peserta bimbingan jabatan)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	(Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja)	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	terciptanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terevaluasinya Dokumen rencana tenaga kerja Kabupaten	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersedianya dokumen dan evaluasi rencana tenaga kerja Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kinerja Operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 2	Menciptakan hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan	Persentase Kasus Hubungan industrial yang terselesaikan	kinerja strategis skpd	Sasaran SKPD	PK JPT
Tahap 3	terciptanya perusahaan/ pemberi kerja dengan tata kelola kerja yang klayak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
Tahap 3	Terbinanya perusahaan/ pemberi kerja untuk penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan yang memiliki PP/PKB/PKWT	Kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 3	Tersusunnya Pengesahan Peraturan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kinerja Operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
Tahap 2	Meningkatnya Pendidikan Angkatan Kerja	Crosscutting	CROSSCUTTING		

Tahap 2	Meningkatnya Kesehatan Tenaga Kerja	Crosscutting	CROSSCUTTING
---------	-------------------------------------	--------------	--------------



**TUJUAN SKPD**

**SASARAN SKPD**

**SASARAN PROGRAM**

**SASARAN KEGIATAN**

**SASARAN SUB KEG**

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka  
 Angka Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja  
 Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan  
 Persentase lapangan kerja yang tersedia

Menciptakan hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan  
 Persentase Kasus Hubungan Industrial yang terselesaikan

Meningkatnya Pendidikan Angkatan Kerja  
 Crosscutting

Meningkatnya Kesehatan Tenaga Kerja  
 Crosscutting

**TUJUAN SKPD**

**PK /SKP JPT**

**PK /SKP KABID**

**PK /SKP JF**

**PK /SKP JF/JP**

Meningkatnya pelatihan keterampilan tenaga kerja  
 (PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA)  
 (Persentase pelatihan keterampilan tenaga kerja)

Meningkatnya layanan informasi peluang kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak swasta  
 (PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA)  
 (Persentase peluang kerja dan kerjasama yang tersedia)

terciptanya perusahaan/ pemberi kerja dengan tata kelola kerja yang layak  
 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  
 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi  
 (Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi)  
 (Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi)

Terselenggaranya layanan informasi peluang kerja  
 (Pengelolaan Informasi Pasar Kerja)  
 (Persentase pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia)

Terselenggaranya pelayanan antar kerja dengan pihak swasta baik di dalam/luar daerah dan luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja  
 (Persentase kerjasama antar kerja)

Terbinanya perusahaan/ pemberi kerja untuk penciptaan hubungan industrial yang kondusif  
 Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan yang memiliki PP/PKB/PKWT

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja  
 Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional  
 (Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja)  
 (Jumlah Instruktur/Pelatih yang profesional)  
 (Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n)

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota  
 Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar  
 (Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota)  
 (Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar)  
 (Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja)

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  
 Tersedianya layanan media informasi peluang kerja  
 (Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online)  
 (Jumlah pencari kerja dan peluang kerja)  
 (Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub))

Job Fair/Bursa Kerja  
 Tersedianya bursa pasar kerja  
 (Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja)  
 (Jumlah pencari kerja di bursa kerja)  
 (Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja)

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  
 Terlaksananya bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya  
 (Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja)  
 (Jumlah peserta bimbingan jabatan)  
 (Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan)

Pelayanan antar Kerja  
 Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja  
 (Terwujudnya Pelayanan antar Kerja)  
 (Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja)  
 (Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL)

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  
 Tersusunnya Pengesahan Peraturan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan  
 (Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online)  
 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan  
 (Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online)